



Komunikasi Pembangunan dalam Pengendalian Rabies di Kota Pekanbaru

Ammalia Retno Sari ^{1*}, Mayarni Mayarni ²

^{1,2} Universitas Riau, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ammalia.retno2217@student.unri.ac.id

Abstract. This study discusses efforts to control rabies in Pekanbaru City. Rabies is a dangerous and deadly zoonotic disease that is still rampant in Pekanbaru City. The reason why there are still many cases of rabies in Pekanbaru City is due to the coverage rabies transmitting animals (RTA) vaccination has not reached the target $\geq 70\%$ according to the Regulation Minister of Agriculture Number 39 of 2023 concerning Minimum Priority Zoonosis Services and The Lack of Public Awareness in preventing rabies is the background to this research. This study aims to determine the development communication process that carried out by the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service in an effort to control rabies and identify the inhibiting factors of development communication. Techniques data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation. Results research shows that development communication in rabies control has implementations through Communication, Information and Education (KIE) activities but not yet running optimally. The inhibiting factors found include mechanical obstacles, namely limitations of media for conveying information, cultural barriers in the form of still being found people who consume rabies transmitting animals (RTA) such as dogs have bad impact on their health, and behavioral barriers in the form of public perception that vaccination is not important. Comprehensive communication efforts are required, implementation of appropriate programs that have been implemented established, and community participation to increase awareness in controlling rabies.

Keywords: Communication; Control; Development; Pekanbaru City; Rabies.

Abstrak. Penelitian ini membahas upaya pengendalian rabies di Kota Pekanbaru. Rabies merupakan zoonosis berbahaya dan mematikan yang masih marak terjadi di Kota Pekanbaru. Penyebab masih maraknya kasus kejadian rabies di Kota Pekanbaru disebabkan oleh cakupan vaksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) yang belum mencapai target $\geq 70\%$ sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas dan minimnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan rabies menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini diteliti untuk mengetahui proses komunikasi pembangunan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam upaya pengendalian rabies dan mengidentifikasi faktor penghambat komunikasi pembangunan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies telah dilaksanakan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) namun belum berjalan optimal. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi hambatan mekanik yakni keterbatasan media penyampaian informasi, hambatan budaya berupa masih ditemukannya masyarakat yang mengkonsumsi HPR seperti anjing yang berdampak buruk bagi kesehatan, dan hambatan perilaku berupa persepsi masyarakat yang menganggap vaksinasi tidak penting. Diperlukan upaya komunikasi yang menyeluruh, pelaksanaan program yang sesuai yang telah ditetapkan, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam pengendalian rabies.

Kata kunci: Komunikasi; Kota Pekanbaru; Pembangunan; Pengendalian; Rabies.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu paling mengerikan setelah HIV/AIDS adalah rabies. Rabies memiliki tingkat kematiannya 100% yang mana virus rabies menyerang sistem pada otak dan susunan syaraf pusat makhluk berdarah panas. Rabies tergolong dalam zoonosis yang dapat berpindah dari binatang kepada manusia. Perlu disadari bahwa apabila terjangkit rabies, virus dapat menyebar cepat ke susunan syaraf pusat melalui sel syaraf kemudian berkembang biak dengan cepat menimbulkan peradangan berat pada otak dan susunan syaraf pusat yang dapat memperburuk kondisi dan mempercepat kematian. Sehingga rabies ditetapkan sebagai penyakit hewan menular strategis (PHMS) utama di Indonesia sebab berpengaruh pada kesehatan hewan dan

manusia serta berdampak pada sistem sosio-ekonomi. Untuk menekan penyebaran rabies salah satu metode dengan ‘Local Area Specific Program Solving’ yakni pengendalian rabies dengan strategi berbasis lingkungan yang berprinsip pada pemusatan di wilayah-wilayah kasus endemis rabies (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah yang belum bisa terlepas dari penyakit rabies sehingga kota Pekanbaru dikatakan menjadi salah satu daerah endemis rabies dan tergolong tinggi. Penyebab tingginya penularan penyakit rabies karna jumlah hewan penular rabies yang belum bisa terakomodir sepenuhnya untuk dilakukan pengendalian rabies. Masih terjadinya kasus positif rabies pada hewan dan tingginya terjadi kasus rabies pada hewan di Kota Pekanbaru penyebabnya adalah belum tercapainya cakupan $\geq 70\%$ vaksinasi pada HPR sesuai ketentuan yang tercantum pada peraturan menteri pertanian republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota. Belum tercapainya cakupan vaksinasi karna masyarakat yang menganggap tidak penting melakukan vaksinasi rabies kepada hewan peliharaannya. Minimnya pelaksanaan sosialisasi oleh pemerintah mengenai rabies menyebabkan masyarakat minim pengetahuan mengenai rabies (Manalu & As, 2024).

Upaya pengendalian rabies salah satunya adalah dengan melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) rabies. KIE rabies dilaksanakan sebagai upaya memastikan masyarakat memahami arti dan nilai penting dari program pengendalian rabies. Masyarakat menjadi objek dalam pembangunan yang mana menerima manfaat dari hasil program yang terlaksanakan. Sehingga diperlukan penyadaran yang dibuat secara menyeluruh dan tersistem. Untuk menekan angka penyebaran kasus rabies khususnya pada hewan penular rabies (HPR), penting untuk dilakukannya komunikasi kepada masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai optimalisasi upaya program pengendalian rabies khususnya di Kota Pekanbaru. Komunikasi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat agar mampu menjalankan program yang telah dicanangkan agar masyarakat dapat memberikan partisipasinya. Namun disini itu juga pemerintah harus lebih serius dalam melancarkan komunikasinya agar informasi dari suatu program dapat diperluas sehingga masyarakat lebih teredukasi. Bersumber dari www.riautelevisi.com, Hamdani selaku Komisi III DPRD kota Pekanbaru menyatakan agar Dinas Pertanian dan Perikanan untuk melakukan langkah antisipasi rabies marak terjadi agar tidak semakin banyak menjangkit hewan peliharaan. Upaya tersebut bisa berupa melakukan sosialisasi secara masif dan vaksinasi rabies agar masyarakat pemilik hewan rabies dapat kesadarannya dapat meningkat sebab tingkat infeksi rabies cukup marak serta menghimbau kepada masyarakat pemilik hewan penular rabies untuk merawat

hewan peliharaan dengan baik, memeriksakan kesehatan dan segera melakukan vaksinasi rabies. Maka dari itu, memasukkan elemen komunikasi pembangunan dalam optimalisasi pengendalian rabies di Kota Pekanbaru harus lebih diperhatikan sehingga bisa diterapkan untuk menyampaikan informasi agar dampak yang diinginkan itu dapat sesuai dengan harapan. Komunikasi pembangunan bukan hanya sekedar penyampaian pesan melainkan untuk melaksanakan rencana pembangunan yang telah tersusun.

Komunikasi pembangunan yang berhasil tidak selalu harus mencakup seluruh target audiens. Tetapi mampu membidik orang-orang tertentu yang telah ditetapkan yang menjadi sasaran yang sangat berpengaruh dalam proses komunikasi pembangunan. Dalam pengendalian rabies di Kota Pekanbaru yang menjadi khalayak adalah seluruh masyarakat pemilik hewan penular rabies (HPR) dan masyarakat umum yang sering berpapasan dengan HPR. Maka dari itu masyarakat harus memahami bagaimana penanganan ketika tergigit HPR sebab siapa saja bisa terkena rabies. Jika masyarakat mengetahui penanganan rabies maka akan meminimalisir risiko kematian akibat virus rabies. Keberhasilan dari suatu program terlihat dari bagaimana tanggapan atau respon dari masyarakat. Respon dari masyarakat diartikan sebagai efek. Efek dari program pengendalian rabies diwujudkan pada perubahan penilaian tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku. Tingkat pengetahuan masyarakat mendorong perubahan perilaku nyata. Perubahan sikap menjadi penting sebab menentukan apakah seseorang akan bersedia menerima dan menjalankan pesan yang disampaikan oleh komunikator.

Dinamisasi komunikasi banyak ditentukan oleh situasi dan kondisi lingkungan, terutama di lingkungan yang menjadi target sasaran komunikasi. Permasalahan yang timbul dari sisi lingkungan dinilai dari geografis, sosial budaya dan ekonomi setempat. Letak geografis yang terlalu padat penduduk dan jumlah HPR semakin besar memiliki risiko penular yang tinggi. Pola pikir, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat di Kota Pekanbaru masih terdapat enggan melakukan vaksinasi rabies karena takut hewannya mati serta budaya masyarakat yang masih mengonsumsi anjing. Aspek ekonomi dalam pengendalian rabies menyoroti dampak finansial akibat biaya pengobatan dan hilangnya produktivitas masyarakat yang terinfeksi. Pencegahan melalui vaksinasi HPR jauh lebih ekonomis dibandingkan pengobatan manusia yang terinfeksi rabies. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanian dan Perikanan rutin menyediakan vaksinasi gratis setiap tahun terutama pada Hari Rabies Sedunia di wilayah berisiko. Namun realisasi antara jumlah alokasi vaksinasi rabies dengan jumlah HPR tidak sebanding dengan vaksinasi yang tersedia.

2. KAJIAN TEORITIS

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan memiliki dua makna yakni administrasi dan pembangunan. Administrasi merujuk pada seluruh tahapan implementasi keputusan yang telah dibuat dan dilakukan oleh kedua pihak atau lebih guna menargetkan sasaran yang ditetapkan, sementara pembangunan diartikan sekumpulan upaya untuk menciptakan kemajuan serta transformasi berdasarkan rencana yang telah disusun dan kesadaran dilakukan melalui peran suatu bangsa dalam upaya pembaharuan dalam konteks pembangunan negara. Administrasi pembangunan juga dapat dimaknai sebagai administrasi publik yang dapat melakukan perubahan menuju transformasi, inovasi dan adaptasi dalam perencanaan. Administrasi pembangunan juga dimaknai sebagai administratif pembangunan dan penyelenggaraan program pembangunan. Untuk penyelenggaraan pembangunan diperlukan hal tersebut yakni mesin administrasi itu sendiri harus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memungkinkan terkoordinasi dengan baik dan multifungsi pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan nasional dalam pembangunan (Anggara & Sumantri, 2016).

Administrasi pembangunan berorientasi pada berbagai upaya yang mengarah kepada transformasi yang dianggap lebih positif. Tujuan utamanya dimaksud untuk memberikan bantuan serta mendorong terjadinya kearah transformasi keadaan yang dianggap lebih baik serta mendukung dan mendorong terjadinya transformasi signifikan dalam berbagai aktivitas atau aspek kehidupan yang saling terkait dan akan menghasilkan munculnya proses pembangunan yang efektif. Menurut Thompson bahwa Administrasi Pembangunan mencakup kemampuan organisasi untuk membantu “innovate”. Administrasi pembangunan dikaitkan dengan perbaikan dan peningkatan administrasi dengan aspek perkembangan dibidang tertentu seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain (Susanti, 2024)

Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan merupakan integrasi antara dua konsep utama, yakni komunikasi dan pembangunan. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin *communico*, *communis*, atau *communicate* yang berarti “sama” atau “membuat sama”. Dalam konteks ini, komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang bermakna dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain, dengan tujuan untuk mempengaruhi, membangun pemahaman bersama, atau menciptakan kesamaan persepsi. Istilah pembangunan juga berasal dari kata bahasa Inggris *develop*, mengandung makna tindakan ke arah perkembangan (*developing*), kemajuan (*progress*), serta pertumbuhan (*growth*). Oleh karena itu, pembangunan dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan menuju pola hidup, nilai-

nilai, dan kondisi sosial yang lebih baik. Sehingga, komunikasi pembangunan dapat dipahami proses penyampaian informasi dan pertukaran pesan yang bertujuan untuk mendukung terjadinya transformasi sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat. Proses ini berkontribusi terhadap pencapaian kemandirian, peningkatan kapasitas, serta kesadaran masyarakat dalam rangka mendorong kemajuan. Dengan adanya dua konsep ini, komunikasi pembangunan diartikan sebagai aktivitas manusia yang membawa informasi ide, benda, tempat, orang, dan kebijakan melalui dimana manusia memahami orang lain dan juga dipahami oleh orang lain (Cangara, 2020).

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) merupakan proses aktivitas penyebaran pesan untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan mendorong perubahan perilaku individu dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. KIE berfungsi sebagai sarana penyadaran yang dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan sistematis. Dalam upaya program pemberantasan rabies, KIE menjadi salah satu pendekatan strategis yang bersifat komprehensif. Melalui KIE, masyarakat diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam berbagai upaya pencegahan, seperti program vaksinasi penular rabies, pelaporan kasus secara dini, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pemilik hewan terhadap hewan peliharaannya. Dengan demikian, KIE berperan penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami esensi dan urgensi dari program program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengendalian rabies (Kementerian Pertanian, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif yang berlandaskan pada pendekatan fenomenologis untuk memahami kondisi objek secara alamiah. Penelitian ini akan dilakukan di kota Pekanbaru dengan memfokuskan pada kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru karena pelaksanaan kegiatan KIE rabies idealnya dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan veteriner di kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota. Lokasi Dinas Pertanian dan Perikanan kota Pekanbaru Jl. Ibrahim Sattah, No. 30, kelurahan Cinta Raja, kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Kepala Puskesmas Rumbai, Kepala Puskesmas Tenayan, Masyarakat pemilik hewan penular rabies (HPR), dan Masyarakat yang memiliki peluang tertular rabies.

Dalam konteks ini, data primer didapat melalui kegiatan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu Profil Dinas Pertanian dan Perikanan kota Pekanbaru, *One Health Roadmap* Eliminasi Rabies Nasional 2030, Masterplan Nasional Pemberantasan Rabies di Indonesia, Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti saat ini berupa skripsi, jurnal, artikel dan lain-lain, serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, data display, dan kesimpulan/verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Pembangunan Dalam Pengendalian Rabies Di Kota Pekanbaru

Upaya menganalisa dan mendeskripsikan terkait Komunikasi Pembangunan Dalam Pengendalian Rabies Di Kota Pekanbaru, maka penulis menggunakan konsep teori yang diperkenalkan oleh Harfied Cangara (Cangara, 2020) dengan indikator : Komunikator, Pesan, Media, Khalayak, Efek, Umpan Balik dan Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota bahwa rabies termasuk dalam jenis zoonosis prioritas dan upaya pengendalian zoonosis ini penyelenggaraannya oleh dinas di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan pemerintah di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Maka, dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mengenai siapa saja yang terlibat dalam upaya pengendalian rabies di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data tentang komunikator terkait pengendalian rabies di kota Pekanbaru.

Adapun hasil wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut : “Yang terlibat itu adalah teman yang berada di bidang perternakan dan kesehatan hewan khususnya yang berada di lingkup kesehatan hewan, baik itu dokter hewan, medik dan paramedik veteriner.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, Ibu Rita Setiawati, 25 Februari 2025).

Pembentukan pesan harus berlandaskan pada sesuatu hal yang sesuai dengan konteks kebutuhan khalayak. Maka dari itu pentingnya acuan dalam pembentukan pesan dalam

komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies di kota Pekanbaru. Acuan dalam pembentukan pesan dapat berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaannya. Sehingga pesan yang akan disampaikan mudah dipahami oleh khalayak. Dengan adanya acuan yang jelas dalam pesan komunikasi pembangunan, proses penyampaian pesan pengendalian rabies akan menjadi lebih terarah, sistematis, dan berdampak terhadap pembangunan masyarakat. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mengenai apa saja yang menjadi acuan dalam pembuatan pesan dalam dilaksanakannya KIE rabies sebagai upaya pengendalian rabies di Kota Pekanbaru. Adapun hasil wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Acuan dalam pembuatan pesan KIE rabies adalah perundang-undangan tentang pencegahan dan penanganan rabies, perundang-undangan tentang peternakan tahun 2009, petunjuk dari kementerian peternakan dan petunjuk dari provinsi. Kemudian inti pesan dari KIE rabies adalah rabies merupakan penyakit yang dapat menularkan ke manusia. Sehingga jangan sampai manusia tertular. Bagaimana pencegahan supaya kita ini dapat bebas rabies yang tidak dapat menularkan rabies baik ke sesama hewan ataupun hewan ke manusia. Hewan-hewan yang menggigit tidak apa-apa tapi jangan sampai menyebabkan manusia meninggal. Inilah acuan paling utama. Lalu apa yang harus dilakukan yakni pentingnya dilakukan vaksinasi.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, Ibu Rita Setiawati, 25 Februari 2025).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota Pasal 6 ayat 3 bahwa materi dalam KIE rabies dapat berbentuk media elektronik, media cetak, dan/atau media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, media yang digunakan dalam penyampaian pesan secara langsung menggunakan media komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan proses ketika seseorang atau sekelompok orang yang berkumpul untuk memulai berbagi informasi kepada khalayak atau memberikan presentasi tentang topik tertentu untuk menyampaikan pesan. Yang mana pesan ini dapat dipelajari oleh khalayak. Maka dalam hal ini media komunikasi publik melibatkan banyak orang bersifat tatap muka, terbuka dan langsung. Media komunikasi publik biasanya memanfaatkan rumah ibadah, balai desa, dan rapat akbar dan semacamnya.

“Tahun lalu kami mengadakan KIE Rabies dan Vaksinasi Rabies di Gereja St. Veronika mengajak masyarakat luas dan anak-anak SD Santa Veronika. Kami lakukan KIE rabies dahulu setelah itu kami memvaksin HPR lalu kami memberikan buku tanda bukti vaksinasi rabies

sebagai catatan HPR itu sudah divaksin kapan dan sudah berapa kali serta sebagai sarana edukasi terkait rabies karna di dalamnya terdapat informasi rabies itu apa, penyebabnya apa, gejalanya bagaimana dan P3K rabies seperti apa.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, Ibu Rita Setiawati, 25 Februari 2025).

Dalam pengendalian rabies di kota Pekanbaru yang menjadi khalayak adalah seluruh masyarakat yang memiliki (Hewan Penular Rabies) HPR dan masyarakat umum yang sering berpapasan dengan HPR. Pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pengendalian rabies di Kota Pekanbaru dalam menerima pesan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang harmonis antara komunikator dan khalayak. Kerjasama ini akan terwujud jika pesan disampaikan dengan jelas, sehingga komunikan dapat memahami isi pesan secara tepat. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama informan berikut :

“Tentunya masyarakat yang punya hewan peliharaan yang berpotensi menjadi penular rabies seperti anjing, kucing serta masyarakat yang disekitarnya banyak HPR yang bisa menularkan rabies itu juga menjadi sasaran sih. Karna merekalah yang berpotensi menularkan rabies ke hewan tersebut semisal nya lingkungannya banyak hewan penular rabies maka dapat berpotensi menularkannya.” (Wawancara dengan Kepala Puskesmas Rumbai Kota Pekanbaru, Ibu drh. Emma Fajrianti pada tanggal 25 Februari 2025).

Indikator komunikasi pembangunan selanjutnya adalah efek. Efek merupakan suatu perbedaan antara apa yang menerima pikiran, rasakan dan lakukan sebelum dan sesudah menerima pesan. Suatu komunikasi pembangunan yang efektif apabila pesan yang ingin disampaikan oleh sumber dapat dipahami dan diterima oleh khalayak. Dalam hal ini pesan dapat diterima dan diartikan diartikan sebagai keberlanjutan dari reaksi yang didapatkan oleh khalayak. Reaksi dari masyarakat inilah bisa dikatakan sebagai efek. Efek dari program pengendalian rabies ini dibagi menjadi dua yaitu efek dari khalayak atau masyarakat yang sudah mengetahui program dan efek dari komunikan atau masyarakat yang belum mengetahui tentang program yang telah dilakukan. Hal tersebut selaras dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang telah peneliti lakukan sebagai berikut :

“Sebenarnya sebelumnya masyarakat itu tidak tahu bahwa rabies itu berbahaya. Setelah di medsos banyak anak anak yang tergigit, terus menjadi tertular ke manusia mereka akan menjadi tahu. Sebelumnya mereka tidak tahu digigit itu bagaimana cara penanganannya menjadi tahu atau pemilik hewan yang awalnya tidak tahu bahwa rabies itu ada vaksinnya menjadi tahu.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, Ibu Rita Setiawati, 25 Februari 2025).

Menggunakan pendekatan komunikasi yang berlangsung dari bawah ke atas (bottom-up) dalam pengendalian rabies di Kota Pekanbaru berfokus pada keterlibatan masyarakat dan elemen-elemen lainnya di tingkat lokal dapat ditumbuhkan dengan keaktifan dalam partisipasi pengambilan keputusan. Keaktifan masyarakat dalam partisipasi pengambilan keputusan dapat dilihat dari peran masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat dalam diskusi yang membahas permasalahan seperti peningkatan kasus gigitan rabies yang terjadi di lingkungannya. Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Rumbai Kota Pekanbaru, Ibu drh. Emma Fajrianti :

“Kami mengadakan lokakarya pada tanggal 17 Februari 2025 di kelurahan Rumbai Timur untuk memantau kasus rabies. Sebab di daerah tersebut ada kasus gigitan HPR dan kami memutuskan dilakukannya observasi selama 10 hari. Lokakarya dihadiri oleh Dinkes, RT,RW, puskesmas, dan kader kader posyandu. Adapun tanggapan dari hasil lokakarya adalah mereka meminta untuk mengedukasi masyarakat dan HPR segera divaksin di lingkungan RT/RW di wilayah Rumbai.” (Wawancara dengan Kepala Puskesmas Rumbai Kota Pekanbaru, Ibu drh. Emma Fajrianti, 25 Februari 2025).

Kemudian tidak hanya kepadatan penduduk saja yang mempengaruhi risiko terjadinya rabies dalam aspek penilaian lingkungan terhadap pengendalian rabies tetapi juga daerah yang berpapasan dengan daerah endemis virus rabies terhadap HPR ataupun daerah populasi HPR yang tinggi dapat mempengaruhi risiko penularan rabies. Daerah yang berbatasan dengan zona endemis rabies sering mengalami risiko penularan yang lebih tinggi karena HPR pergerakannya bebas seperti anjing, kucing ataupun kera yang bisa membawa virus rabies. Tanpa pemantauan dan vaksinasi efektif di wilayah ini dapat menjadi titik baru penyebaran rabies yang sulit dikendalikan. Berikut ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Ibu Rita Setiawati untuk mengetahui daerah yang menjadi daerah sasaran utama dalam pengendalian rabies:

“Biasanya daerah pinggiran seperti rumbai ataupun daerah perbatasan dengan yang memiliki populasi HPR yang tinggi dan angka kasus gigitan yang tinggi sehingga itulah menjadi penentu daerah yang menjadi sasaran utama. Untuk saat ini daerah utamanya adalah kecamatan Rumbai, kecamatan Rumbai Timur, kecamatan Tenayan Raya, kecamatan Kulim, kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Lima Puluh, kecamatan Sukajadi atau daerah pusat kota juga kami jadikan prioritas dan daerah pojokan dekat pelabuhan.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, Ibu Rita Setiawati, 25 Februari 2025).

Faktor – Faktor Penghambat Komunikasi Pembangunan Dalam Pengendalian Rabies Di Kota Pekanbaru

Setelah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, penulis telah menemukan hambatan-hambatan yang menghalangi keberhasilan dari komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies di kota Pekanbaru. Adapun faktor-faktor penghambat dalam komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Hambatan mekanik dalam komunikasi pembangunan merujuk pada gangguan yang terjadi akibat masalah teknis atau media yang digunakan. Dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru masih terdapat masyarakat yang tidak mempunyai alat komunikasi elektronik sehingga mereka tidak dapat mengakses sosial media ataupun mengetahui program pengendalian rabies yang mana telah dijelaskan sebelumnya oleh drh. MI. Rita Setiawati, MM bahwa penyebaran informasi melalui media sosial yakni Whatsapp dan melalui Instagram. Hal inilah yang menyebabkan masih banyak ditemui masyarakat yang belum mengetahui KIE rabies dalam pengendalian rabies. Berikut ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat pemilik HPR :

“Kami tidak mengetahui adanya kegiatan KIE rabies ataupun vaksinasi rabies yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Kalaupun ada kami mau datang.” (Wawancara bersama pemilik Hewan Penular Rabies di kota Pekanbaru Bapak Tambas Simangunsong, 22 Maret 2025).

Hambatan budaya dalam komunikasi pembangunan merujuk pada adanya kesulitan yang muncul akibat perbedaan budaya, norma, nilai, dan kebiasaan yang dianut oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Sehingga saat pelaksanaan program tidak bisa berjalan dengan semestinya akibat adanya perbedaan tersebut. Dalam hal ini khalayak yakni masyarakat memiliki pandangan budaya yang mereka jalani selama ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies di kota Pekanbaru.

Penulis melakukan wawancara Kepala Puskesmas Rumbai Kota Pekanbaru. Berikut ini wawancara dengan Kepala Puskesmas Rumbai Kota Pekanbaru mengenai hambatan budaya komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies di kota Pekanbaru. Adapun hasil wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Budaya masyarakat yang mengonsumsi hewan peliharaannya seperti anjing. Jika anjing itu divaksin maka mereka takut kalau anjingnya sudah divaksin akan berdampak buruk bagi tubuhnya. Padahal dalam pandangan agama seperti Islam tidak boleh dikonsumsi dan juga banyak di luaran sana larangan memakan anjing tidak dibenarkan karena anjing istilahnya

merupakan hewan kesayangan.” (Wawancara dengan Kepala Puskesmas Rumbai Kota Pekanbaru, Ibu drh. Emma Fajrianti, 25 Februari 2025).

Hambatan perilaku merupakan faktor yang menghalangi seseorang untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan tujuannya. Hambatan perilaku dapat muncul atas dasar prasangka yang didasarkan pada emosi yang muncul akibat dari ketidakpastian atau rasa takut yang muncul sehingga berdampak pada ketidakmauan untuk menerima. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru telah melaksanakan program pengendalian rabies kepada masyarakat namun saat pelaksanaannya terjadi penolakan oleh masyarakat.

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Berikut ini wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mengenai hambatan perilaku komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies di kota Pekanbaru. Adapun hasil wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Tanggapan negatif masyarakat ada yang tidak mau divaksin karena takut setelah divaksin hewannya mati. Itu susah kalau paradigmanya seperti itu. Terkadang disangkanya divaksin bisa membuat hewannya mati padahal sih merekanya yang tidak memperhatikan hewan peliharaannya kan. Sehingga kami sering dapat penolakan dari masyarakat saat kami hendak melaksanakan KIE Rabies dan vaksinasi rabies.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, Ibu Rita Setiawati, 25 Februari 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan penelitian komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori Komunikasi Pembangunan menurut Cangara mencakup unsur-unsur yakni komunikator, pesan, media, khalayak, efek, umpan balik, dan lingkungan. Penelitian ini menilai bahwa dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Kesimpulan dari hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Analisis terhadap komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies di Kota Pekanbaru berfokus membahas dengan menggunakan teori komunikasi pembangunan oleh Cangara mengungkapkan bahwa komunikasi pembangunan menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan. Komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies di Kota Pekanbaru masih belum berjalan secara optimal. Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai komunikator belum mampu menjangkau masyarakat secara menyeluruh dan belum terbentuknya Kader Siaga Rabies (Kasira) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam

penyampaian pesan kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan telah sesuai standar namun belum dapat diterima sepenuhnya. Pemanfaatan media elektronik sebagai saluran komunikasi modern belum dilakukan secara maksimal, sehingga jangkauan informasi masih rendah. Cakupan pelaksanaan pesan dalam penyampaian secara langsung kegiatan KIE rabies belum merata ke seluruh kecamatan dan belum menjangkau ke seluruh pemilik hewan peliharaan rabies (HPR). Sasaran komunikasi, terutama pemilik HPR, belum terlayani merata. Efek dari komunikasi pun belum menghasilkan perubahan signifikan dalam pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Selain itu, sistem umpan balik dari masyarakat belum tersedia, dan lingkungan sosial budaya masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung keberhasilan program vaksinasi rabies.

2. Faktor penghambat yang peneliti temui pada penelitian komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies di kota pekanbaru antara lain hambatan mekanik, budaya, dan perilaku. Hambatan mekanik masih ditemukan masyarakat yang belum mengetahui KIE rabies dalam upaya pengendalian rabies dikarenakan mereka tidak mempunyai alat komunikasi elektronik sehingga tidak dapat mengakses sosial media. Budaya masyarakat untuk mengonsumsi daging hewan peliharaannya seperti anjing dapat mengakibatkan risiko tertular penyakit rabies dan penyakit lainnya terutama jika hewan tersebut saki atau terinfeksi.

Berdasarkan hasil dari pembahasan terkait permasalahan dalam penelitian komunikasi pembangunan dalam pengendalian rabies di Kota Pekanbaru, beberapa hal yang dapat disarankan yaitu :

1. Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar Dinas Pertanian dan Perikanan agar melaksanakan optimalisasi komunikasi pembangunan. Peran pemerintah kota yakni Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai komunikator pembangunan sangat penting untuk mengedukasi masyarakat dan mengubah persepsi tentang rabies, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah HPR yang divaksinasi dan cakupan vaksinasi rabies disesuaikan dengan jumlah keseluruhan HPR di Kota Pekanbaru. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memastikan program yang dicanangkan dapat berjalan dan masyarakat berpartisipasi. Komunikasi pembangunan harus digunakan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan melaksanakan rencana pembangunan yang telah tersusun. Pembentukan Kader Siaga Rabies dibentuk untuk membantu Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Disarankan kepada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan KIE Rabies secara masif dan melaksanakan vaksinasi rabies untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik hewan. Pesan Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) harus fokus pada empat hal utama yakni merawat hewan peliharaan, mencegah gigitan anjing, tindakan setelah digigit anjing (manajemen gigitan) dan upaya pelaporan kasus gigitan HPR dengan upaya pendekatan berbasis khalayak agar menciptakan efek sosial yang lebih kuat dalam upaya pencegahan rabies. Selain itu pendekatan sesuai budaya dan kondisi sosial masyarakat secara persuasif perlu diterapkan agar dapat mudah diterima oleh masyarakat sehingga dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap vaksinasi rabies dan pemeliharaan hewan.

DAFTAR REFERENSI

- Andri, K. (2021). *Ensiklopedia of Journal*, 3(5), 88–95. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi pembangunan: Teori dan praktik*. CV Pustaka Setia.
- Budayanti, N. S. (2020). *Penerapan konsep One Health dalam penanganan kasus rabies*. Deepublish.
- Cangara, H. (2020). *Komunikasi pembangunan*. Rajawali Pers.
- Cardona, D. (2020). *Strategi komunikasi pembangunan dalam penataan pedagang kaki lima*. Scopindo Media Pustaka.
- Dalimoenthe, I. (2022). *Pengantar ilmu pembangunan*. PT Bumi Aksara.
- Gold, S., Donnelly, C. A., Nouvellet, P., & Woodroffe, R. (2020). Rabies virus neutralising antibodies in healthy, unvaccinated individuals: What do they mean for rabies epidemiology? *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 14(2), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007933>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *One Health roadmap eliminasi rabies nasional 2030* (pp. 1–119).
- Kementerian Pertanian. (2019). *Masterplan nasional pemberantasan rabies di Indonesia* (pp. 1–100). Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Mahiri, M. A. M., Lutfiah, H., Afifah, N., & Sodik, A. (2023). Kajian teori pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja strategis. *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 12(2), 82–92. <https://doi.org/10.31000/jmb.v12i2.7368>
- Manalu, D., & As, H. (2024). Implementasi program pengendalian dan penanggulangan rabies (Studi kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal* 8, 42704–42711. (Catatan: perlu nama jurnal yang lengkap)
- Muharsono. (2021). *Administrasi pembangunan*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Mukarom, Z. (2021). *Teori-teori komunikasi berdasarkan konteks*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muljono, P. (2021). *Dinamika komunikasi pembangunan di tanah air*. IPB Press.

- Parlin, W. (2019). Factors affecting the incidence of rabies disease in Puskesmas Rejosari Pekanbaru City. *Jurnal Ipteks Terapan*, 13(1), 12–20. <https://doi.org/10.22216/jit.2019.v13i1.1507>
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan 2022* (pp. 1–84).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota.
- Riva'i, A. K. (2016). *Komunikasi sosial pembangunan*. Hawa dan Ahwa.
- Susanti, T. D. (2024). *Administrasi pembangunan*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Tesha Hestyana. (2021). Pembentukan dan pelatihan kader siaga rabies di Kelurahan Palas Kota Pekanbaru. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 733–740. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4161>
- Tjahjadinata, C., & Clarita, W. (2024). Rabies pada anak: Pencegahan dan tata laksana. *Cermin Dunia Kedokteran*, 51(7), 379–383. <https://doi.org/10.55175/cdk.v51i7.1082>
- Winda Kustiawan, Syakilah, N., Simanjuntak, M. W., Nandini, N., & Aliya, H. T. D. (2023). Peran komunikasi pembangunan dalam membangun desa. *Public Service and Governance Journal*, 4(1), 144–149. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i1.883>
- Yusuf, A. M. (2019). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Prenadamedia Group. <https://doi.org/10.31227/osf.io/83sjt>